

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2020 ini tepat waktu sesuai batas yang diberikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Kab. Banjar tahun 2020 ini merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja pemerintahan dan pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten dan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

LKjIP ini juga diharapkan mampu memberikan informasi bagi seluruh pihak terkait mengenai pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Dalam penyusunan laporan kinerja ini mungkin masih terdapat banyak kekurangan maupun kekeliruan baik dalam teknik penyusunan maupun pengumpulan data, namun diharapkan laporan kinerja ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya, dan semoga di tahun yang akan datang capaian kinerjanya dapat semakin ditingkatkan dan sesuai target yang telah ditetapkan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuandan partisipasi dalam rangka penyusunan dokumen LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ini.

Kepala Badan,

Aslam, S.Sos, M.AP

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2020 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-1 (satu) dan Misi ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Pada misi ke 1 (satu), yakni “Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Dan Suasana Kehidupan Beragama” Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni Meningkatnya Nuansa Kehidupan Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari dengan sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan 5 (lima) program yang dilaksanakan yakni :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
5. Program Kewaspadaan Diri dan Pembinaan Masyarakat

Untuk pencapaian pada Misi 1 (satu) dengan sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banjar menetapkan Indikator Sasaran yaitu Penurunan Kasus Kriminal, untuk tahun 2020 ditetapkan target 254 kasus kriminal terkait perjudian, sajam, miras dan narkoba terjadi di Kabupaten Banjar, dan sampai akhir tahun 2020 di Kabupaten Banjar tercatat ada 181 kasus kriminal yang terjadi, yang artinya didapatkan realisasi sejumlah 181 kasus, dengan persentase sebesar 128,74 persen capaian kinerja.

Adapun anggaran biaya yang ditetapkan menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 771.106.230 dengan realisasi sebesar Rp. 643.597.925 atau sebesar 83,46 persen.

Adapun pada misi ke 5 (kelima) untuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar mempunyai tujuan yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat, dengan program yang dilaksanakan yakni Program Pendidikan Politik Masyarakat. Untuk tahun 2020 ditetapkan target sasaran sebanyak 73% partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, dengan capaian akhir ada 77,44 persen partisipasi politik masyarakat yang artinya ada realisasi kinerja sebesar 106,08 persen.

Adapun anggaran biaya yang ditetapkan menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 438.381.100 dengan realisasi sebesar Rp. 339.867.367 atau sebesar 77,53 persen

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan.

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas.
4. Menemukan alternatif pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar kepada Bupati
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan program dan kegiatan pada Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat , maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

4. Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembauran Kebangsaan.
5. Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah.
6. Permendagri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
7. Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di daerah.
8. Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
9. Permendagri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar.
11. Peraturan Bupati Banjar Nomor 113 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.

B.1 Kedudukan.

Badan Kesatuan bangsa dan Politik merupakan unsur Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas.

Badan Kesatuan bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri.

B.3 Fungsi

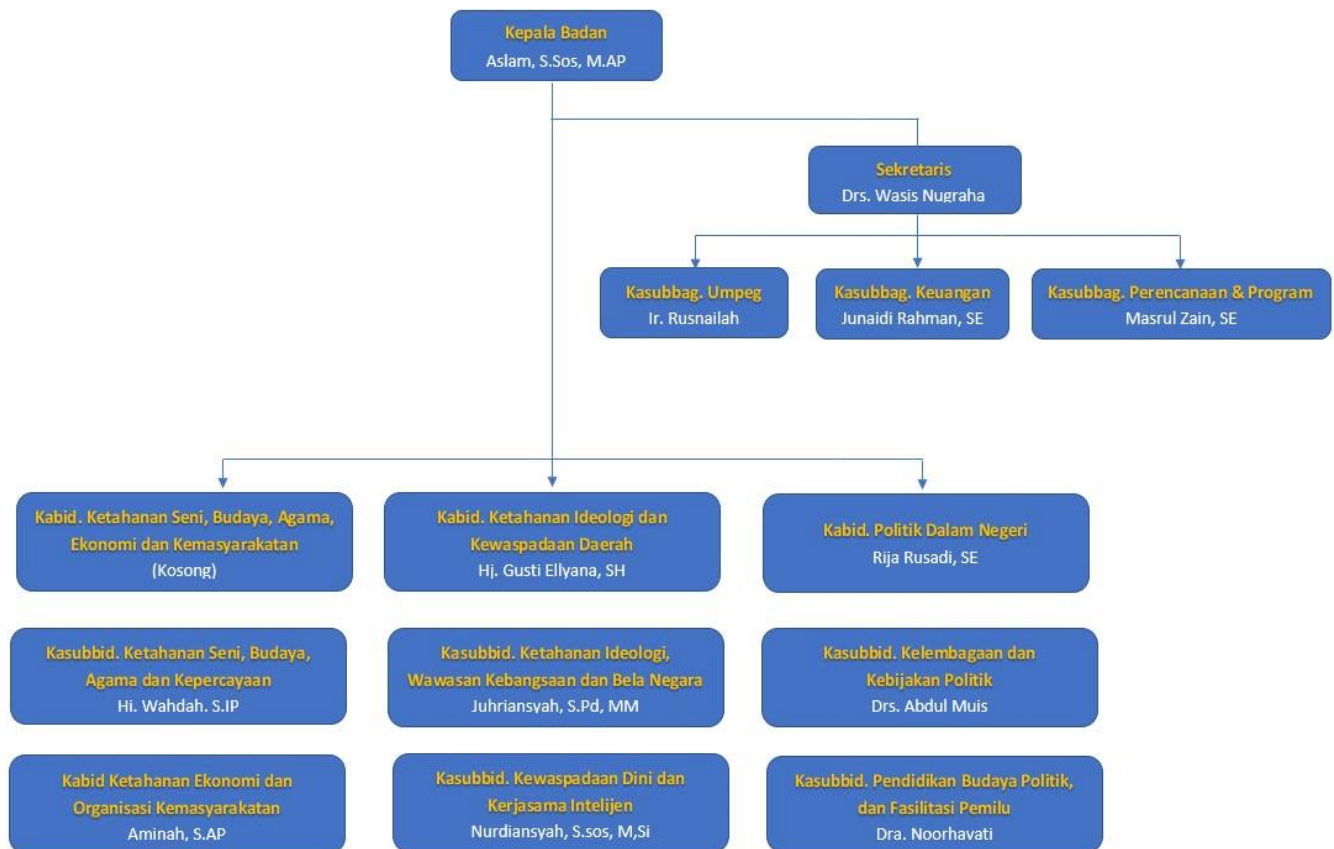
Badan Kesatuan bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
2. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bidang Ideologi Dan Kewaspadaan Daerah.
3. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan.
4. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan Dan Pengendalian Kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri.
5. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
6. Penyelenggaraan urusan Kesekretariatan.
7. Pembinaan terhadap unit Pelaksana Teknis.
8. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi SKPD terdiri dari:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan dan Program
- c. Bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah
 1. Subbidang Ketahanan Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
 2. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Intelijen
- d. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan.
 1. Subbidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kepercayaan
 2. Subbidang Ketahanan Ekonomi dan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Bidang Politik Dalam Negeri
 1. Subbid Kelembagaan dan Kebijakan Politik
 2. Subbid Pendidikan Budaya Politik dan Fasilitasi Pemilihan Umum.

Gambar 1
Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar



IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pencapaian tujuan pembangunan daerah diawali dengan perumusan perencanaan yang berkualitas. Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Badan Kesatuan bangsa dan Politik yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang meliputi Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri Dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Identifikasi permasalahan merujuk pada dokumen perencanaan yang telah ditetapkan (Renstra dan Renja) yaitu melalui proses analisis pohon masalah sehingga diperoleh mapping matriks masalah pokok, masalah dan akar masalah, dan hirarki permasalahan tersusun secara *cascading* (berjenjang) kemudian disajikan dalam bentuk diagram pohon masalah.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi menjadi arah petunjuk bagi kepala daerah dalam memantau kondisi dilapangan guna mengambil langkah kebijakan, atau dengan kata lain menjadi

mata dan telinganya kepala daerah yakni Bupati untuk mengetahui informasi terkini di wilayahnya maka aparat pada Badan Kesbangpol harus memiliki penguasaan dalam penyusunan kegiatan yang dapat berdaya guna serta selaras dengan program prioritas kepala daerah, yang tentunya harus ditunjang dengan tersedianya sumber daya manusia yang cukup secara kuantitas dan memiliki kapabilitas dan kualitas yang baik, terkait hal tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik masih menghadapi permasalahan sebagai berikut :

Tabel Permasalahan pada SKPD

No	Masalah	Pokok Masalah	Akar Masalah
	Permasalahan keamanan dan ketertiban yang berpotensi apabila tidak dipelihara dengan baik dapat meningkatkan kejahatan baik secara kuantitas maupun kualitasnya	Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Partisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab Banjar kurang optimal dan perlu ditingkatkan
		kurangnya tingkat kewaspadaan dini masyarakat dalam mendeteksi dan mencegah munculnya konflik sosial/sara	kemampuan aparat dan masyarakat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara masih rendah
		Kurang optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.	pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila di masyarakat masih rendah dan merosotnya kecintaan terhadap nilai-nilai budaya bangsa di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda.
		Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal	Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparat) dalam pemantapan kemitraan wawasan kebangsaan
		Belum optimalnya pengendalian penyakit masyarakat (PEKAT)	Terjadinya dekadensi moral di masyarakat yang ditandai dengan banyaknya penyakit masyarakat, seperti kriminalitas, penyalahgunaan narkoba dan miras.
	Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan politik masyarakat	Kurangnya porsi pendidikan politik di masyarakat	Pemahaman Politik masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan politik dan berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat

Sumber data : Revisi Renstra Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021

D. ISU STRATEGIS

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik yang meliputi Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah, Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan dan Politik Dalam Negeri, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik, oleh karenanya analisis isu strategis merupakan langkah awal didalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Isu Strategis merupakan Permasalahan yang belum diselesaikan dan akan diselesaikan (*unresolved problem*). Identifikasi isu-isu tersebut ditapis dengan kriteria tertentu pada Permendagri 86 Tahun 2017, sehingga akan diperoleh isu strategis yang akan diselesaikan. Isu strategis pada dokumen perencanaan yang kemudian dimunculkan pada dokumen pelaporan kinerja. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi FKDM;
2. Pemantapan stabilitas politik dilingkungan masyarakat;
3. Pemberdayaan FKUB secara maksimal;
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi di lingkungan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban;
5. Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan pengamalan terhadap empat pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat.
6. Meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian dan pengamalan nilai-nilai dan etika budaya bangsa di masyarakat.
7. Meningkatkan pemahaman terhadap etika dan budaya politik demokrasi yang berdampak pada tingkat partisipasi politik masyarakat terutama pemilih pemula dan kaum wanita, baik dalam pemilu maupun proses pengambilan keputusan kebijakan publik di masyarakat

Sistematika Penyajian

Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2020 disusun sebagai berikut :

Kata Pengantar;

Daftar Isi;

Ringkasan Eksekutif;

Pada Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan tentang maksud dan tujuan penyusunan dokumen LKjIP, Tugas pokok dan fungsi (struktur organisasi), Permasalahan serta isu strategis organisasi.

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menjelaskan tentang kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2020.

Bab III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020

Menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi tahun 2020 dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 beserta analisisnya

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan Saran.

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mengampu urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Berdasar urusan dan program yang diampu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendukung pencapaian 2 (dua) misi Kabupaten Banjar yang tercantum pada RPJMD yaitu :

- a. Misi ke 1 (satu), yakni “Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Dan Suasana Kehidupan Beragama” dengan tujuan yang ingin dicapai yakni Meningkatnya Nuansa Kehidupan Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari dengan sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

- b. Misi ke 5 (kelima) untuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”, dengan tujuan Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat

Pengukuran pencapaian misi dapat dilihat melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dilengkapi dengan indikator-indikator kinerja sasaran. Keseluruhan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebanyak 2 (dua) indikator.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1.	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	Penurunan kasus-kasus tindakan kriminal terkait Perjudian, sjudam, miras dan narkoba yang terjadi di masyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun berikut dan setelah tahun berikutnya	261 kasus kriminal pada tahun 2019 menjadi 254 kasus pada tahun 2020 dan berkurang 6 kasus pada tahun berikutnya.	Polres Banjar
2.	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase Kehadiran masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu.	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pilkada pada tahun 2020 dengan target 73 % masyarakat yang terdaftar untuk bisa menggunakan hak pilihnya.	Bidang Politik Dalam Negeri

Sumber : Surat Keputusan IKU SKPD

B. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2020 mengacu pada Renstra Perubahan Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahun 2020 meliputi (1) sasaran strategis, dengan pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui (1) indikator kinerja sasaran beserta targetnya. Perjanjian kinerja telah ditetapkan secara berjenjang (pohon kinerja) mulai dari eselon II, eselon III dan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN		SATUAN	TARGET	ANGGARAN	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6		7		8	9	10	11
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan kasus kriminal	kasus	254							1.859.663.000	Kepala Badan
2	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat	Persen	73								
					1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Bulan	12	462.171.140	Sekretaris
					a	Penyediaan jasa surat menyurat		Jumlah materai yang tersedia	lembar	800	3.900.000	Kasubbag. Umpeg
					b	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah rekening jaringan telpon dan internet speedy yang dibayarkan	Rekening	2	17.000.000	Kasubbag. Umpeg
					c	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan operasional untuk service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	buah	13	79.081.790	Kasubbag. Umpeg
					d	Penyediaan ATK		Jumlah ATK yang tersedia	Jenis	51	16.058.528	Kasubbag. Umpeg

					e	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Jenis	6	12.292.000	Kasubbag. Umpeg
					f	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jenis	10	3.000.000	Kasubbag. Umpeg
					g	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan kelengkapan kantor	Jenis	2	13.800.000	Kasubbag. Umpeg
					h	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan spanduk/banner	Jenis	2	4.400.000	Kasubbag. Umpeg
					i	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	Tahun	1	13.005.000	Kasubbag. Umpeg
					j	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tahun	1	31.877.126	Kasubbag. Umpeg
					k	Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Orang	9	267.756.696	Kasubbag. Umpeg
					2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang menunjang kinerja ASN	Bulan	12	139.250.000	Sekretaris
					a	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	buah	12	70.250.000	Kasubbag. Umpeg
					b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah ruangan gedung yang direnovasi	dok	1	10.000.000	Kasubbag. Umpeg

					c	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan untuk service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	buah	1	36.700.000	Kasubbag. Umpeg
					d	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jenis	4	8.100.000	Kasubbag. Umpeg
					e	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	Jenis	5	14.200.000	Kasubbag. Umpeg
					3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya pemahaman aparatur badan kesbangpol Kab. Banjar tentang peraturan perundang-undangan	Persen	90	21.008.355	Sekretaris
					a	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/kursus yang terkirim	orang	2	21.008.355	Kasubbag. Umpeg
					4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP	Nilai	75	27.746.175	Sekretaris
					a	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	Dok	2	420.000	Kasubbag. Keuangan
					b	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	Dok	1	1.820.000	Kasubbag. Keuangan
					c	Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan sinkronisasi kegiatan pemerintah daerah	Dok	2	3.725.000	Kasubbag. Perencanaan dan Program

					d	Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Dok	5	7.625.000	Kasubbag. Perencanaan dan Program
					e	Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja (LPPD,LKjIP dan LKPJ)	Dok	3	8.455.000	Kasubbag. Perencanaan dan Program
					f	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil monev	Laporan	28	5.701.175	Kasubbag. Perencanaan dan Program
					5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	Persen	100	301.085.540	Kabid Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah
					a	Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	laporan	7	285.581.540	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Intelijen
					b	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	Jumlah dokumen (laporan)	Dokumen	1	15.504.000	Kasubbid Kewaspadaan Dini dan Intelijen
					6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase ormas yang terdaftar	persen	15	113.824.800	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Masyarakat
					a	Peningkatan Rasa Solidaritas dan Ikatan Sosial Dikalangan Masyarakat	Jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar) / ormas yang melapor	Ormas	16	94.408.800	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Masyarakat

					b	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai Nilai Luhur Budaya Bangsa	Sosialisasi/ penyuluhan	Kegiatan	1	19.416.000	Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
					7	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan	peserta	0	94.555.840	Kepala Bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah
					a	Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan	peserta	0	94.555.840	Kasubbid Ketahanan Ideologi, Wasbang dan Bela Negara
					8	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi, miras, dan sajam)	persen	2	135.576.810	Kepala Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
					a	Penyuluhan, Pencegahan dan Peredaran Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	1. Jumlah peserta kegiatan penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan narkoba/P4GN 2. Seminar pencegahan dan penanggulangan narkoba 3. Workshop P4GN	peserta kegiatan kegiatan	60 0 0	108.221.610	Kasubbid. Ketahanan Ekonomi & Organisasi Kemasyarakatan
					b	Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Peserta	120	27.355.200	Kasubbid. Ketahanan Ekonomi & Organisasi Kemasyarakatan
					c	Penyuluhan Pencegahan Senjata Tajam	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan membawa senjata	-	-	0	Kasubbid. Ketahanan Ekonomi & Organisasi Kemasyarakatan

					9	Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Kasus terkait isu SARA	persen	0	126.063.240	1. Bidang Ketahanan Ideologi dan Kewaspadaan Daerah 2. Bidang Ketahanan Seni Budaya, Agama, Ekonomi dan Kemasyarakatan
					a	Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	Peserta	0	44.874.000	Kasubbid. Kewaspadaan Dini & Kerjasama Intelijen
					b	Sosialisasi dan Pembentukan FKUB	Jumlah peserta sosialisasi FKUB	Peserta	0	58.331.740	Kasubbid Ket. Seni Budaya, Agama dan Kepercayaan
					c	Sosialisasi dan Pembentukan FPK	Jumlah peserta sosialisasi FPK	Peserta	0	22.857.500	Kasubbid Ket. Ideologi Wasbang & Bela Negara
					10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu Legislatif dan Presiden. 2. Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada	Persen Persen	73 73	438.381.100	Bidang Politik Dalam Negeri
					a	Penyuluhan Kepada Masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Kegiatan	1	12.788.600	Kasubbid. Kelembagaan & Kebijakan Politik
					b	Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	Kegiatan	1	50.091.800	Kasubbid. Pendidikan Budaya Politik & Fasilitasi Pemilu

					c	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	Peserta	40	60.009.500	Kasubbid. Pendidikan Budaya Politik & Fasilitasi Pemilu
					d	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah laporan (dokumen)	Dokumen	1	8.141.700	Kasubbid. Kelembagaan & Kebijakan Politik
					e	Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	Laporan	9	14.942.500	Kasubbid. Kelembagaan & Kebijakan Politik
					f	Dukungan kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilkada Tahun 2020	Jumlah Tim pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak diakomodir oleh APBN	Kegiatan	2	292.407.000	Kasubbid. Pendidikan Budaya Politik & Fasilitasi Pemilu

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2020

Terdapat beberapa tahapan didalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah Perjanjian kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. untuk perjanjian kinerja telah dimuat dalam bab II mengenai rencana kinerja tahun 2020.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

- Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- Jika Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator kinerja} = ((\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}) / \text{Rencana})) \times 100 \%$$

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar tahun 2020 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 100%	Berhasil	Hijau
2	70% < 100%	Cukup Berhasil	Biru
3	40% < 70%	Kurang Berhasil	Kuning
4	<40%	Tidak Berhasil	Merah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis/Program /Kegiatan	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Target		Realisasi	Capaian (%)	Predikat
			Satuan	Tahun 2020			
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Kasus kriminal	Angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	kasus	254	181	128,74	Berhasil
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Provinsi	Jumlah masyarakat yang ikut memilih dalam pemilu dibagi jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dikali 100%	%	73	77,44	106,08	Berhasil
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	Jumlah kasus penyampaian aspirasi (demonstrasi) yang dimediasi/difasilitasi dibagi jumlah penyampaian aspirasi yang terdata dikali 100%	%	100	100	100%	Berhasil
Terbentuknya Forkopimda dan Timdu	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	Diambil dari jumlah kali rapat/pertemuan tim	dok/rapat	2 kali rapat/1 dok	2 kali rapat/1 dok	100%	Berhasil

Terbentuknya Tim Koordinasi dan pengawasan orang/tenaga kerja/lembaga asing	Jumlah dokumen (laporan)	Diambil dari jumlah kali kegiatan monev	dok	1	1	100	Berhasil
Menumbuhkan dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat	Persentase Ormas yang terdaftar	Jumlah ormas yang terdaftar dibagi jumlah ormas yang ada dikabupaten Banjar dikali 100%	%	15	72,78	485,2	Berhasil
Terlaksananya pengawasan dan pembinaan ormas	Jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar) / ormas yang melapor	Diambil dari jumlah SKT/ormas yang melapor	Jmlh Ormas	16 Ormas	18 ormas	112,5	Berhasil
Terlaksananya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah	Sosialisasi / penyuluhan	Diambil dari jumlah kali kegiatan sosialisasi	Jmlh Sosialisasi	1	1	100	Berhasil
Meningkatnya Kemitraan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan	Diambil dari jumlah pemangku kepentingan yang berhadir pada acara	Peserta	200	0	0%	Kurang Berhasil
Terlaksananya kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan	Jumlah orang yang mengikuti seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	100	0	0%	Kurang Berhasil
Meningkatkan Keterlibatan Dalam Usaha Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba	Jumlah kasus Pekat tahun N dikurang jumlah kasus Pekat tahun N-1 dibagi jumlah kasus Pekat tahun N dikali 100%	%	2	29,28	1.464	Berhasil
Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	1)Jumlah peserta keg penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba / P4GN, (2)Seminar pencegahan dan Penanggulangan narkoba (3)Workshop P4GN, (4)Jalan sehat anti narkoba, (5)Lomba pidato tentang bahaya narkoba	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	60	60	100%	Berhasil
Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	120	120	100%	Berhasil
Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan membawa sajam	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan membawa senjata tajam	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	0	0	0%	Kurang Berhasil
Terciptanya Kewaspadaan, Kerukunan dan Pembauran di Masyarakat	Kasus terkait isu SARA	Angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	kasus	0	0	100%	Berhasil

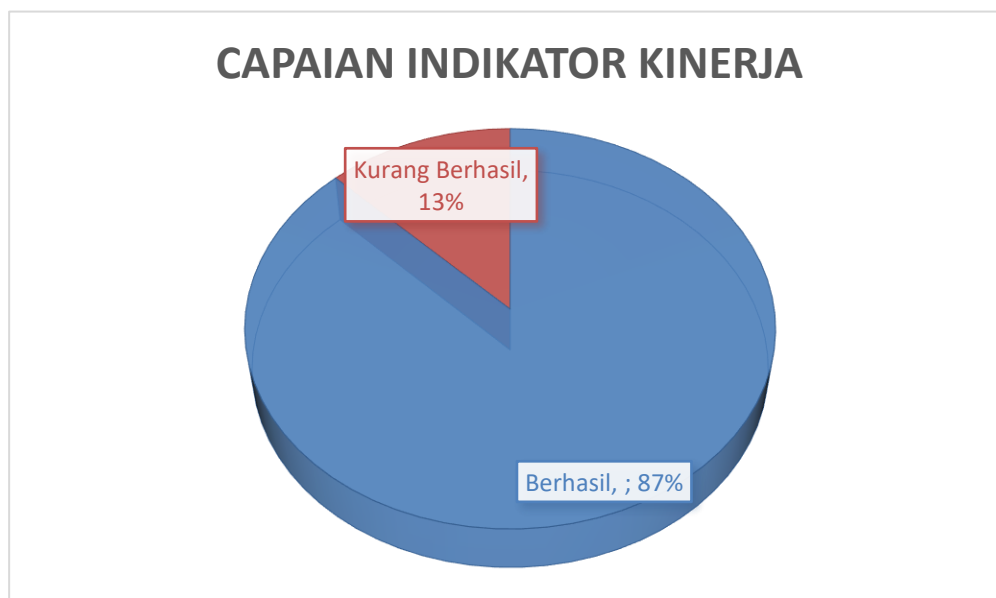
Terlaksananya sosialisasi FKDM	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	0 peserta	0 peserta	0%	Kurang Berhasil
Terlaksananya sosialisasi FKUB	Jumlah peserta sosialisasi FKUB	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	0 peserta	0 peserta	0%	Kurang Berhasil
Terlaksananya sosialisasi FPK	Jumlah peserta sosialisasi FPK	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	Peserta	0 peserta	0 peserta	0%	Berhasil
Meningkatnya Pengetahuan dan Pendidikan Politik Pada Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	Persentase Kehadiran Pemilih dalam Menggunakan hak pilihnya	%	73	77,44	106,08	Berhasil
Terselenggaranya penyuluhan pendidikan politik pada masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian Parpol	Diambil dari jumlah kali kegiatan sosialisasi	kegiatan	2	0	0%	Kurang Berhasil
Terselenggaranya penyuluhan forum diskusi politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	Diambil dari jumlah orang yang berhadir pada acara kegiatan	peserta	40	0	0%	Kurang Berhasil
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait perkembangan politik di daerah	Jumlah Laporan (dokumen)	Diambil dari jumlah laporan yang disusun	laporan	1	0	100%	Berhasil
Sosialisasi Permendagri 36 Tahun 2018 dan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Parpol	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	Diambil dari jumlah laporan yang diverifikasi	laporan	9	9	100%	Berhasil
Terlaksananya fasilitasi dukungan penyelenggaraan Pileg dan Pilkada	Jumlah Tim Pemantauan, Pembinaan, Fasilitasi dan Pengadaan Sarana prasarana yang tidak diakomodir oleh APBD Provinsi	Diambil dari jumlah tim kegiatan yang dibentuk	kegiatan	2	0	100%	Berhasil
Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Hasil penilaian SAKIP SKPD	Nilai	-	-	-	-
Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan sinkronisasi kegiatan pemerintah daerah	Diambil dari jumlah dokumen perencanaan yang wajib disusun	dok	2	2	100%	Berhasil
Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Diambil dari jumlah dokumen yang wajib disusun	dok	5	5	100%	Berhasil
Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja (LPPD, LKJIP dan LKPJ)	Diambil dari jumlah dokumen laporan kinerja yang wajib disusun	dok	3	3	100%	Berhasil
Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil monev	Diambil dari jumlah laporan yang disusun	laporan	28	28	100%	Berhasil

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	Diambil dari jumlah dokumen yang wajib disusun	dok	2	2	100%	Berhasil
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	Diambil dari jumlah dokumen yang wajib disusun	dok	1	1	100%	Berhasil
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	Jumlah keperluan yang terpenuhi	Jumlah	-	-	-	-
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	lembar	800	800	100%	Berhasil
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jaringan telpon dan internet speedy yang dibayarkan	Disesuaikan dengan jumlah rekening yang wajib dibayar	rekening	2	2	100%	Berhasil
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang mendapat fasilitas service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Disesuaikan dengan jumlah kendaraan operasional yang ada	Buah	13	13	100%	Berhasil
Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	52	52	100%	Berhasil
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	6	6	100%	Berhasil
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	10	10	100%	Berhasil
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan kelengkapan kantor	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	2	2	100%	Berhasil
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan spanduk/banner	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	2	2	100%	Berhasil
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Tahun	1	1	100%	Berhasil
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Tahun	1	1	100%	Berhasil
Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Disesuaikan dengan jumlah tenaga pendukung yang dibutuhkan	Orang	9	9	100%	Berhasil
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Buah	20	20	100%	Berhasil
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat fasilitas service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	Disesuaikan dengan jumlah kendaraan jabatan yang ada	Buah	1	1	100%	Berhasil
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan renovasi yang	Disesuaikan dengan jumlah dokumen yang disusun	dok	1	1	100%	Berhasil

	disusun						
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	5	5	100%	Berhasil
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	Jenis	4	4	100%	Berhasil
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pemahaman aparatur badan kesbangpol tentang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan pemahaman aparatur	Persen	100	75	75%	Kurang Berhasil
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/kursus yang terkirim	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan	orang	2	2	100%	Berhasil

Sumber : Data dari KPU Banjar, Polres Banjar dan laporan dari Bidang Badan Kesbangpol

Chart Capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Sasaran Program Tahun 2020



Dari 2 sasaran strategis dan 6 sasaran program yang ditetapkan, tujuh sasaran statusnya berhasil, yakni dari 2 sasaran strategis dan 5 sasaran program, adapun sasaran program yang statusnya kurang berhasil adalah pada sasaran “Meningkatnya Kemitraan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan” karena kegiatan penyuluhan dan seminarnya tidak bisa dilaksanakan dengan alasan adanya pandemi covid-19

Adapun untuk realisasi kinerja pada sasaran strategis dan sasaran program tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Strategis Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Untuk target indikator kinerja pada sasaran strategis Penurunan Jumlah Kasus kriminal, jenis kriminal yang diperhitungkan dalam target ini adalah kriminal terkait Perjudian, Narkotika, Psikotropika, Sajam dan Miras.

Pada tahun 2020 ditargetkan ada sebanyak 254 kasus kriminal yang terjadi di kabupaten Banjar dan realisasinya ada 181 kasus kriminal yang terjadi yang menunjukkan ada capaian kinerja sebesar 128,74 persen dimana untuk data kriminalnya sendiri didapatkan dari laporan Polres Banjar yang disampaikan kepada Badan Kesbangpol Kab. Banjar.

- Sasaran Strategis Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat.

Pada sasaran ini indikator yang dipakai adalah Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, untuk data perhitungannya didapatkan dari KPU Kab. Banjar, dimana pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 306.344 orang masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dari 395.589 orang masyarakat yang terdaftar, baik statusnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang pindah memilih, maupun yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb). Sehingga dapat dihitung persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu ada sebesar 77,44 persen, adapun target pada tahun 2020 adalah ada sebanyak 73 persen dari masyarakat yang terdaftar mengikuti pemilu, sehingga dapat dihitung capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 106,08 persen.

- Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal.

Pada program ini indikator yang digunakan adalah persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat, pada tahun 2020 tercatat ada 2 (dua) kasus penyampaian aspirasi oleh masyarakat terkait konflik sosial dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut terlibat dalam proses mediasi :

- Kasus sengketa lahan antara PT. Borneo Indo Tani dengan masyarakat di tiga desa di kecamatan Cintapuri.
- Kasus sengketa lahan antara PTPN Danau Salak dengan masyarakat PTPN Danau Salak dengan masyarakat Desa Sungai Arfat.

Selain melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik proses mediasi ini juga melibatkan unsur pemerintah kecamatan, aparat keamanan dan para tokoh masyarakat. Sehingga secara perhitungan dari target 100 persen jumlah kasus yang ditangani maka capaian kinerjanya juga 100 persen karena dari dua

kasus konflik sosial yang dilaporkan keduanya langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Target kinerja pada kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan adalah 2 rapat/pertemuan dan penyusunan 1 dokumen rencana aksi daerah dari tim terpadu penanganan konflik sosial, pada tahun 2020 realisasi kinerja sesuai target yang ditentukan dengan capaian 100%.

- b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Target kinerja pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah 1 laporan dengan realisasi kinerja sesuai target yang ditentukan dengan capaian 100%. Adapun laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan pemantauan dan Pendataan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Banjar.

- Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Indikator dalam program ini adalah Persentase Ormas yang terdaftar dengan target ada 15 persen ormas terdaftar dari seluruh ormas yang ada di Kabupaten Banjar, pada tahun 2020 tercatat ada 180 ormas di Kabupaten Banjar dan dari sejumlah itu 49 ormas tidak memperpanjang izinnya, hanya 131 ormas yang aktif izinnya, sehingga kalau dimasukkan dalam perhitungan 131 ormas itu jumlahnya adalah 72,78 persen dari seluruh ormas yang ada.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.

Target kinerja pada kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat ini adalah jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar)/ormas yang melapor, pada tahun 2020 ditargetkan ada 16 ormas yang membuat SKT atau melaporkan diri bagi ormas yang terdaftar secara berjenjang, realisasinya ada 18 ormas yang membuat SKT dan melapor sehingga capaian kinerjanya adalah 100 persen.

- b. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Target kinerja pada kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa adalah 1 kegiatan dengan realisasi

kinerja 1 kegiatan dengan capaian 100%, berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Kembali Budaya Banjar, dengan peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan dibidang kesenian, guru beserta pelajar.

- Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Indikator pada program ini adalah Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan dengan target 200 peserta, didalam program ini kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan merupakan satu-satunya kegiatan didalamnya, dengan indikator jumlah orang yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dengan targetnya 100 orang peserta, namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak sempat terlaksana, sehingga capaian kinerja program dan kegiatannya adalah nol.

- Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Indikator pada program ini adalah persentase penurunan PEKAT (judi, miras, sajam, narkoba) dengan target 2 persen ditahun 2020. Realisasinya angka kriminal terkait Pekat pada tahun 2020 sebanyak 181 kasus, dan jumlah kasus Pekat tahun sebelumnya ditahun 2019 yakni sebanyak 234 kasus, sehingga ada penurunan kasus sebanyak 53 kasus dibanding tahun sebelumnya, maka kalau dihitung persentase penurunan kasus Pekat pada tahun 2020 adalah sebesar 22,65 persen, dengan kinerja pada program ini sebesar 1.464 persen.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba.

Target kinerja pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja sebanyak 1 kegiatan yakni Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras & narkoba di PKBM Bania Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota tanggal 14 Februari 2020.

- b. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian.

Target kinerja pada kegiatan ini adalah 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan capaian 100 persen.

Adapun kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian berlokasi di :

1. Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat

2. Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar.

c. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Membawa Senjata Tajam.

Karena alasan pemangkasan anggaran kegiatan ini dihapuskan.

- Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Indikator pada program ini ada dua yakni persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Legislatif dan Presiden, serta persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Provinsi, untuk tahun 2020 indikator yang dipakai adalah persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Provinsi, dengan target sebesar 73 persen. pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 306.344 orang masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pilkada Provinsi dari 395.589 orang masyarakat yang terdaftar baik statusnya terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemilih yang pindah memilih, maupun yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb), sehingga dapat dihitung persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu ada sebesar 77,44 persen, adapun target pada tahun 2020 adalah ada sebanyak 73 persen dari masyarakat yang terdaftar mengikuti pemilu, sehingga dapat dihitung capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 106,08 persen.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat.

Pada awalnya target kinerja pada kegiatan ini adalah penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 3 paket kegiatan, namun karena adanya pandemi Covid-19 dimana mengumpul massa/melaksanakan penyuluhan menjadi hal yang mustahil dilaksanakan sehingga target kinerja diganti menjadi 1 kegiatan anjagsana kepada masyarakat, namun karena beberapa alasan kegiatan ini pun tidak bisa dilaksanakan.

b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian perselisihan partai politik.

Semula target kinerja pada kegiatan ini adalah 2 kegiatan sosialisasi, namun karena alasan pemangkasan anggaran kegiatan sosialisasinya dihapuskan, sehingga kinerjanya adalah nol.

c. Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik.

Target kinerja pada Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik adalah 1 kegiatan sosialisasi dengan realisasi kinerja sebanyak 0 kegiatan dengan capaian 0 persen.

d. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Target kinerja pada Kegiatan monev adalah 1 laporan dokumen, untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik, pemerintahan yang kondusif di daerah perlu melakukan

pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Realisasi kinerja berhasil menyusun 1 laporan dokumen, dengan capaian 100 %. Ada 4 kegiatan selama 1 tahun yaitu setiap triwulan Tim membuat laporan yang intinya memantau kondisi kamtibmas dan politik di wilayah Kabupaten Banjar. Sehubungan dengan tahun 2020 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah maka tim monev lebih fokus memonitor persiapan dan pasca pelaksanaan Pilkada.

e. Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik

Target kinerja untuk kegiatan Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik adalah 9 laporan dengan realisasi target kinerja 9 laporan dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi bantuan keuangan Parpol yang masuk dan telah memenuhi persyaratan kelengkapannya berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan hasil Rapat Tim Verifikasi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi teradap 9 (Sembilan) proposal/permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ditahun 2020. Dan hasilnya 9 (Sembilan) Parpol tersebut di atas dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim.

Untuk besarnya bantuan keuangan ke pada Partai Politik di Kabupaten Banjar sesuai dengan SK Bupati Banjar Nomor 188.45/267/KUM/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang Pemberian Bantuan Keuangan untuk Pembinaan Partai Politik di Kabupaten Banjar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	BESARNYA BANTUAN PER SUARA (Rp)	JUMLAH BESARNYA BANTUAN (Rp)
1	PARTAI NASDEM	43.143	4.000,-	172.572.000,-
2	P K B	30.047	4.000,-	120.188.000,-
3	P K S	10.169	4.000,-	40.676.000,-
4	PDI - P	17.934	4.000,-	71.736.000,-
5	PARTAI GOLKAR	49.232	4.000,-	196.928.000,-

6	PARTAI GERINDRA	49.690	4.000,-	198.760.000,-
7	PARTAI DEMOKRAT	24.436	4.000,-	97.744.000,-
8	P A N	16.228	4.000,-	64.912.000,-
9	P P P	30.112	4.000,-	120.448.000,-
10	PARTAI HANURA	5.668	4.000,-	22.672.000,-
	J U M L A H			1.106.636.000

Sumber : Bidang Politik Dalam Negeri

Untuk Pemberian bantuan keuangan kepada Parpol tersebut dilaksanakan oleh pihak BPKAD Kabupaten Banjar, sedangkan pihak Badan Kesbangpol Kabupaten Banjar hanya bertugas memverifikasi kelengkapan administrasi proposal masing-masing parpol.

Dalam Tahun Anggaran 2020, hanya 9 (sembilan) Partai Politik yang memperoleh Bantuan Keuangan Partai Politik, adapun Partai Amanat Nasional belum bisa mencairkan bantuan tersebut karena terkendala pada Laporan Pertanggungjawaban yang belum diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan.

f. Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Target kinerja pada Kegiatan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilkada tahun 2020 adalah 2 kegiatan, dengan realisasi kinerja 2 kegiatan dengan capaian 100 %.

Adapun realisasi kegiatan ini berupa :

1. Pendirian posko pemantauan pilkada tahun 2020 dan pembuatan spanduk Pilkada
2. Pembuatan Buku Saku Pilkada 2020

- Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat.

Dalam program ini indikator kinerjanya adalah Kasus terkait isu SARA, ditargetkan ada 0 kasus SARA pada tahun 2020 dengan capaian 0 kasus SARA yang terjadi sehingga perhitungannya adalah 100 persen.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM

Semula target kinerja pada kegiatan sosialisasi dan pembentukan FKDM ini adalah 300 peserta sosialisasi, namun dengan alasan pemangkasan anggaran, kegiatan sosialisasi FKDM nya dihapus, sehingga target kinerja pada kegiatan ini adalah nol.

b. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKUB.

Semula target kinerja pada kegiatan sosialisasi dan pembentukan FKUB ini adalah 300 peserta sosialisasi, namun dengan alasan pemangkasan anggaran, kegiatan sosialisasi FKUB nya dihapus, sehingga target kinerja pada kegiatan ini adalah nol.

c. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FPK

Semula target kinerja pada kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FPK ini adalah 60 peserta sosialisasi, namun dengan alasan pemangkasan anggaran, kegiatan sosialisasi FPK nya dihapus, sehingga target kinerja pada kegiatan ini adalah nol

A.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Dengan Tahun Sebelumnya

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 merupakan bagian dari kinerja strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana yang tercantum pada perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya untuk mengetahui kecenderungan/trend meningkat atau menurun dari tahun sebelumnya. Perbandingan antara realisasi/capaian kinerja Tahun 2020 dengan Tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi/Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	2017		2018		2019		2020	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	Penurunan kasus-kasus kriminal terkait Narkotika (pada tahun 2016) Kasus kriminal keseluruhan (tahun 2017 dan 2018) Angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	Kasus	580	638	560	651	Tidak Menjadi Indikator lagi			
2	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat jumlah unjuk rasa//demonstrasi/jumlah gejala masyarakat.	Jumlah mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat dibagi jumlah penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat. Dimana angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	Persen	100	100	100	100				

3	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat Kab/Kec/desa dan kelurahan yang aktif	Jumlah FKDM, FKUB, FPK dan PPWK yang aktif dibagi jumlah FKDM, FKUB, FPK dan PPWK yang ada di kabupaten Banjar dikali 100%	persen	33,15	21,39	44,48	27,04				
4	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal.	Penurunan kasus-kasus tindakan kriminal terkait Perjudian, sajam, miras dan narkoba yang terjadi di masyarakat dari angka yang tinggi pada tahun awal ke angka yang lebih rendah pada tahun berikut dan setelah tahun berikutnya. Angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	Kasus					261	234	254	181

4	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	Persentase Kehadiran masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Dimana angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	persen					73	76,99	73	77,44
---	--	--	--------	--	--	--	--	----	-------	----	-------

Berdasarkan data pada tabel 3.3 dapat terlihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar ada tiga Indikator Kinerja yakni :

1. Penurunan Jumlah Kasus Kriminal.
2. Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat jumlah unjuk rasa//demonstrasi/jumlah gejolak masyarakat.
3. Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat Kab/Kec/desa dan kelurahan yang aktif

Kemudian sejak tahun 2019 Indikator Kinerja Sasaran yang dipakai berubah menjadi 2 (dua) indikator saja yakni :

1. Penurunan Jumlah Kasus Kriminal
2. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Untuk Indikator Kinerja Sasaran “Penurunan Jumlah Kasus Kriminal” pada tahun 2016 objek jenis kriminalnya adalah penyalahgunaan Narkotika/narkoba, kemudian pada tahun 2017 sampai tahun 2018 objek kriminal yang dipakai dalam perhitungan berubah menjadi kriminal secara umum (semua kasus kriminal yang terjadi), lalu untuk tahun 2019 objek kriminalnya berubah menjadi kasus kriminal yang terkait perjudian, sajam, miras dan narkoba.

Pada sasaran strategis penurunan jumlah kasus kriminal pada tahun 2019 capaiannya ada 234 kasus kriminal dari target yang sebesar 261 kasus, sedangkan pada tahun 2020 terjadi penurunan yang sangat signifikan, tercatat kasus kriminal terkait Pekat cuma ada sebanyak 181 kasus dari target sebanyak 254 kasus.

Sedangkan untuk sasaran strategis Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu, pada tahun 2020 target yang ditetapkan sebesar 73 persen, dengan capaian hasil sebesar 77,44 persen, pada tahun 2019 hasil yang didapatkan sebesar 76,99 persen, yang artinya pada tahun 2020 ada kenaikan sebesar 0,45 persen

Tabel 3.4

Matrik Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Program dan Kegiatan SKPD beserta Rencana Pendanaannya Tahun 2016-2021

SKPD : Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Banjar

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lokasi (Diisi pada keg atau program yang obyek/sasarannya desa/kec)		
									2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada akhir Periode	
									Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0	Target	Rp0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama dan Suasana Kehidupan Beragama	Meningkatkan Nuansa Kehidupan Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari	xxxxx	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Kasus Kriminal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran						1.331.300.000		1.052.570.000		780.963.790		1.083.470.000		1.043.470.000			
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Lembar			650 lbr	3.000.000	650 lbr	3.000.000	300 lbr	3.900.000	800 lbr	3.900.000	800 lbr	3.900.000				
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jaringan telepon dan internet speedy yang dibayarkan	rekening			2 rekening	25.000.000	2 rekening	30.000.000	2 rekening	16.800.000	2 rekening	30.000.000	2 rekening	30.000.000				
					Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan operasional untuk service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	buah			12 buah	120.000.000	13 buah	120.000.000	13 buah	70.029.165	15 buah	120.000.000	15 buah	120.000.000				
					Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah ATK yang tersedia	Jenis			36 jenis	28.000.000	36 jenis	30.000.000	36 jenis	21.000.000	40 jenis	30.000.000	40 jenis	30.000.000				
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang tersedia	Jenis			6 jenis	22.300.000	6 jenis	22.300.000	6 jenis	13.130.000	6 jenis	22.300.000	6 jenis	22.300.000				
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis			10 jenis	3.000.000	10 jenis	3.270.000	10 jenis	3.270.000	10 jenis	3.270.000	10 jenis	3.270.000				
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan kelengkapan komputer kantor	Jenis			2 jenis	23.000.000	2 jenis	23.000.000	2 jenis	15.989.500	2 jenis	23.000.000	2 jenis	23.000.000				
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan	Jenis			2 jenis koran	21.000.000	2 jenis koran	21.000.000	2 jenis koran	13.416.500	2 jenis koran	21.000.000	2 jenis koran	21.000.000				

				perundang-undangan	spanduk/banner														
				Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum dalam satu tahun	Tahun		1 tahun	250.000.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	117.490.000	1 tahun	150.000.000	1 tahun	150.000.000		
				Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Tahun		1 tahun	200.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	140.802.625	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000		
				Penyediaan pendukung administrasi / teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	Orang		7 orang	350.000.000	7 orang	370.000.000	7 orang	365.136.000	8 orang	390.000.000	8 orang	390.000.000		
				Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya			38 steel	36.000.000	38 steel	30.000.000			40 steel	40.000.000				
				Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas / operasional	Buah		2 buah	50.000.000	3 buah	70.000.000			3 buah	70.000.000	3 buah	70.000.000		
				Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	Buah		9 buah	113.750.000	7 buah	30.500.000	8 buah	30.500.000	12 buah	150.000.000	12 buah	150.000.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan untuk service suku cadang, BBM dan pembayaran	Buah		1 buah	36.550.000	1 buah	36.550.000	1 buah	36.700.000	1 buah	40.500.000	1 buah	40.500.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Jenis		3 jenis	10.000.000	3 jenis	12.500.000	3 jenis	6.865.000	4jenis	17.000.000	4 jenis	17.000.000		
				Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor SKPD yang terpelihara	Jenis		4 jenis	10.000.000	4 jenis	12.500.000	4 jenis	11.797.500	4 jenis	15.000.000	4 jenis	16.000.000		
				Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan interior ruangan/gorden/vas bunga	Jenis		10 jenis	200.000.000	10 jenis	200.000.000			10 jenis	150.000.000	10 jenis	150.000.000		
				Pemeliharaan rutin/ Berkala Gedung Kantor	Jumlah ruangan gedung yang direnovasi	Ruangan								5 ruangan	185.000.000				
				Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pemahaman aparatur badan kesbangpol Kab. Banjar tentang peraturan perundang-undangan	Persen		90%	75.000.000	90%	75.000.000	90%	62.500.000	100%	75.000.000	100%	75.000.000		
				Bimbingan teknis implementasi pearturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/kursus yang terkirim	orang		12 orang	75.000.000	12 orang	75.000.000	12 orang	62.500.000	15 orang	75.000.000	15 orang	75.000.000		
				Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP			75 Nilai	21.750.000	75 Nilai	11.285.000	75 Nilai	27.500.000	75 Nilai	28.100.000	80 Nilai	-		

				Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	Dokumen			7 dokumen	20.000.000	7 dokumen	25.000.000	7 dokumen	9.535.000	7 dokumen	25.000.000	7 dokumen	25.000.000		
				Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	Dokumen			2 dokumen	250.000	2 dokumen	250.000	2 dokumen	250.000	2 dokumen	500.000	2 dokumen	600.000		
				Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	Dokumen			1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	1.500.000	1 dokumen	2.000.000	1 dokumen	2.500.000		
				Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan sinkronisasi kegiatan pemerintah daerah (Renstra, Revisi Renstra dan Renja)	Dokumen									10 Dokumen	22.085.000	10 Dokumen	22.085.000		
				Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	Dokumen									100 Dokumen	36.966.580	100 Dokumen	36.966.580		
				Koordinasi Penyusunan laporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen kinerja (LPPD, Lkjp, LKPJ)	Dokumen									15 Dokumen	26.825.000	15 Dokumen	26.825.000		
				Monitoring dan evaluasi	Jumlah dokumen hasil monev (laporan realisasi fisik dan keuangan, TEPPRA, Lap. Renja, SIPD, RUP)	Laporan									28 Laporan	69.390.440	28 Laporan	69.390.440		
				Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1 Meningkatkan persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat		100 persen		100 persen	945.586.000	100 persen	991.530.000	100 persen	1.201.950.000	100 persen	1.444.116.500	100 persen	1.444.116.500		
				Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	1 Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	Laporan			20 Laporan	903.886.000	20 Laporan	949.830.000	15 Laporan	1.160.250.000	15 Laporan	1.350.000.000	15 Laporan	1.350.000.000		
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Jumlah dokumen (laporan)	Laporan			1 laporan	41.700.000	1 laporan	41.700.000	1 laporan	41.700.000	1 laporan	94.116.500	1 laporan	94.116.500		
				Program pengembangan wawasan kebangsaan	1 Persentase ormas yang terdaftar	Persen	12,17%		15 %	332.000.000	15 %	432.000.000	15 %	195.801.640	15 %	472.000.000	15 %	492.000.000		
				Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat	1 Jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar) / ormas yang melapor	Ormas			16 ormas	332.000.000	16 ormas	432.000.000	16 ormas	161.601.640	16 ormas	432.000.000	16 ormas	432.000.000		

					Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	1 sosialisasi / penyuluhan	Kegiatan			0 kegiatan	0,00	0 kegiatan	0,00	1 kegiatan	34.200.000	2 kegiatan	40.000.000	3 kegiatan	60.000.000		
					Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	1 Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta	200 peserta		450 peserta	452.000.000	450 peserta	484.500.000	450 peserta	188.603.840	450 peserta	538.345.000	450 peserta	568.329.500		
					Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	1 Jumlah orang yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Peserta			450 peserta	452.000.000	450 peserta	484.500.000	200 peserta	188.603.840	200 peserta	538.345.000	200 peserta	568.329.500		
					Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	1 Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait narkoba, judi, miras dan sajam)				2 %	1.340.000.000	2 %	1.410.000.000	2 %	25.482.900	2 %	1.670.000.000	2 %	1.860.000.000		
					Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	1 Jumlah peserta kegiatan penyuluhan tentang bahaya minuman keras dan narkoba/ P4GN 2 Seminar pencegahan dan penanggulangan narkoba 3 Workshop P4GN 4 jalan sehat anti narkoba 5 Lomba pidato tentang bahaya narkoba 6 Pengadaan Baleho	peserta kegiatan kegiatan kegiatan Baleho			1.200 peserta 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 Baleho	1.240.000.000	1.200 peserta 0 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 3 Baleho	1.310.000.000	420 peserta 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 Baleho	415.482.900	420 peserta 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 Baleho	1.460.000.000	420 peserta 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 2 Baleho	1.650.000.000		
					Penyuluhan pencegahan praktek perjudian	1 Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Peserta			300 peserta	50.000.000	300 peserta	50.000.000	300 peserta	105.000.000	300 peserta	105.000.000	300 peserta	105.000.000		
					Penyuluhan pencegahan senjata tajam	1 Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan membawa senjata tajam	Peserta			300 peserta	50.000.000	300 peserta	50.000.000	300 peserta	105.000.000	300 peserta	105.000.000	300 peserta	105.000.000		
					Program Kewaspadaan dini dan Pembinaan Masyarakat	1 Kasus terkait isu SARA		0%		0 %	400.000.000	0 %	440.000.000	0 %	452.172.050	0 %	581.710.000	0 %	601.675.000		
					Sosialisasi dan Pembentukan FKDM	1 Jumlah peserta sosialisasi FKDM	Peserta			300 peserta	150.000.000	300 peserta	165.000.000	300 peserta	180.030.000	360 peserta	217.000.000	360 peserta	217.000.000		
					Sosialisasi dan Pembentukan FKUB	1 Jumlah peserta sosialisasi FKUB dan Sosialisasi	Peserta			360 peserta	150.000.000	360 peserta	165.000.000	360 peserta	162.631.890	360 peserta	199.650.000	360 peserta	219.615.000		

					Sosialisasi dan Pembentukan FPK	1 Jumlah peserta sosialisasi FPK	Peserta			120 peserta	100.000.000	120 peserta	110.000.000	120 peserta	109.510.160	180 peserta	165.060.000	180 peserta	165.060.000		
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih Dan Amanah.	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Program pendidikan politik masyarakat	1 Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden 2 Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada provinsi		Pileg & Pilpres : 70,14% pilkada : 61,89%		0 % 0 %	443.000.000	0 % 0 %	463.000.000	73 % 73 %	759.065.595	73 % 73 %	1.497.000.000	73 % 73 %	450.000.000		
					Penyuluhan kepada masyarakat	1 jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	Peserta			360 peserta	120.000.000	360 peserta	132.000.000	360 peserta	118.500.000	360 peserta	132.000.000	360 peserta	135.000.000		
					fasilitasi penyelesaian perselisihan partai politik	1 Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	Kegiatan			2 kegiatan	38.000.000	2 kegiatan	41.000.000	2 kegiatan	85.995.000	2 kegiatan	100.000.000	2 kegiatan	90.000.000		
					Koordinasi forum-forum diskusi politik	1 Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	Peserta			300 peserta	110.000.000	300 peserta	132.000.000	300 peserta	105.800.000	360 peserta	125.000.000	300 peserta	120.000.000		
					Monitoring, evaluasi dan pelaporan	1 Jumlah laporan (dokumen)	Laporan			1 laporan	40.000.000	1 laporan	45.000.000	1 laporan	30.170.200	1 laporan	45.000.000	1 laporan	35.000.000		
					Pemetaan Politise Kabupaten	1 Jumlah pemetaan politik perdapil,se Kab dan peta dukungan suara DPR dan DPD				5 dapil	30.000.000	0 dapil	0	5 dapil	31.513.000	5 dapil	35.000.000	0 dapil	0		
					Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik	1 Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	Laporan			0 laporan	105.000.000	0 laporan	113.000.000	16 laporan	49.750.000	16 laporan	60.000.000	16 laporan	70.000.000		
					Dukungan kelancaran penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019	1 Jumlah Tim pemantauan, pembinaan, fasilitasi dan pengadaan sarana dan prasarana yang tidak diakomodir oleh APBN								20 Kecamatan	337.337.395						
					Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilu/Pilkada	1 Jumlah Tim Pemantauan, Pembinaan, Fasilitasi dan Pengadaan Sarana prasarana yang tidak diakomodir oleh APBD Provinsi										20 Kecamatan	1.000.000.000				

Sumber : Dokumen Revisi Renstra Badan Kesbangpol 2016-2021

A.3 Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Kinerja Sasaran Tahun akhir periode Renstra

Indikator kinerja sasaran Tahun 2020 merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Periode Tahun 2016-2021. Pencapaian kinerja tahun 2020 Perubahan Renstra dibandingkan dengan capaian kinerja tahun terakhir periode Perubahan Renstra 2021, untuk mengetahui kemampuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 (satu) tahun kedepan dalam mencapai target akhir periode. Perbandingan antara realisasi kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Tahun 2020 dan Target Periode Akhir (2021)

Sasaran Strategis/Sasaran Program	Indikator Kinerja	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Target Periode Akhir Renstra (2021)	Capaian Periode Akhir Renstra (2021)
1	2	3	4	5	6	7=5/6
Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Jumlah Kasus Kriminal	Angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	Kasus kriminal	181	248	127,02
Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Jumlah masyarakat yang ikut memilih dalam pemilu dibagi jumlah masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih dikali 100%	persen	77,44	73	106,08
Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	Jumlah kasus penyampaian aspirasi (demonstrasi) yang dimediasi/difasilitasi dibagi jumlah penyampaian aspirasi yang terdata dikali 100%	persen	100	100	100
Meningkatnya Kemitraan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah peserta seminar, diskusi terkait wawasan kebangsaan	Peserta	0	450	0

Terciptanya Kewaspadaan, Kerukunan dan Pembauran di Masyarakat	Kasus terkait isu SARA	Angka target ditetapkan besarnya sesuai hasil yang ingin dicapai.	kasus	0	0	100
Menumbuhkan dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat	Persentase Ormas yang terdaftar	Jumlah ormas yang terdaftar dibagi jumlah ormas yang ada dikabupaten Banjar dikali 100%	%	72,78	15	485,2
Meningkatkan Keterlibatan Dalam Usaha Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba	Jumlah kasus Pekat tahun N dikurang jumlah kasus Pekat tahun N-1 dibagi jumlah kasus Pekat tahun N dikali 100%	%	29,28	2	1.464
Meningkatnya Pengetahuan dan Pendidikan Politik Pada Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	Persentase Kehadiran Pemilih dalam Menggunakan hak pilihnya	%	77,44	73	106,08

Sumber : KPU Banjar, Polres Banjar dan data dari Bidang-bidang Badan Kesbangpol

Secara umum realisasi kinerja tahun 2020 kalau dibandingkan dengan target realisasi pada Periode Akhir (2021) mempunyai tren positif dimana pada tahun 2020 hampir semua indikator capaiannya lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada akhir tahun 2021 baik itu sasaran strategis maupun sasaran program, seperti pada sasaran strategis Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator Penurunan Jumlah Kasus kriminal, capaian periode akhir reustranya tercatat mendapatkan nilai 137,17 persen yang menunjukkan adanya keberhasilan dalam mengejar target penurunan kasus kriminal di Kabupaten Banjar.

Begitu juga pada sasaran strategis Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat, dalam sasaran ini indikator yang digunakan adalah Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu, dimana kalau kita bandingkan dengan capaian tahun 2020 maka capaian periode akhir reustranya mempunyai nilai kinerja yang positif sebesar 106,08 persen. Demikian juga pada sasaran program semua indikator capaiannya berhasil dengan nilai capaian kinerja 100 persen atau lebih.

Kecuali sasaran program Meningkatkan Kemitraan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang pada tahun 2020 realisasinya 0, karena kegiatan penyuluhan atau sosialisasi yang direncanakan dihapus kegiatannya dengan alasan pemangkasan anggaran serta juga dihadapkan adanya kondisi pandemi Covid-19

B. Analisis Capaian Kinerja Sasaran

Dalam pencapaian target kinerja sasaran, terdapat faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta solusi yang telah dilakukan.

B.1 Sasaran 1

“Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat”

Hasil evaluasi capaian kinerja Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Penurunan Jumlah Kasus kriminal	254 kasus	181 kasus	128,74 %

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Karena adanya kerjasama dan koordinasi yang intensif dengan institusi terkait (TNI/Polri)
- 2) Diperkirakan akibat adanya pandemi Covid-19 dimana ruang gerak dan aktivitas masyarakat dibatasi oleh Pemerintah dan aparat keamanan, sehingga turut mendorong penurunan tindak kriminal Pekat.

Faktor Penghambat pencapaian sasaran ini adalah :

- 1) Pemerintah Daerah yang diwakili Badan Kesbangpol tidak bisa mengintervensi dan terlibat langsung dalam pencapaian sasaran ini, karena urusan pemberantasan dan penanggulangan kriminalitas adalah ranah dan tugas aparat keamanan khususnya pihak Kepolisian dengan dibantu aparat TNI, disini peranan Pemerintah Daerah khususnya Badan Kesbangpol lebih kearah sebagai pelaksana pendukung untuk mengawal stabilitas politik, ekonomi dan keamanan daerah, dimana *leading sector* penyusun kebijakan/strategi dan pelaksana teknisnya adalah pihak Polri.

- 2) Untuk memback up dan mendukung program penanggulangan kriminal ini sejatinya diperlukan dana yang besar, namun pagu anggaran kegiatan yang didapat dari tahun ketahun relatif semakin kecil.

Catatan Penting Dalam Pencapaian Sasaran.

Perlunya dukungan dan komitmen dari pemerintah daerah dalam mendukung sasaran ini karena pencapaian sasaran ini perlu bersinergi dengan instansi diluar pemerintah daerah seperti pihak kepolisian.

Sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dengan indikator Penurunan Jumlah Kasus kriminal ini didukung dengan 5 (lima) program yakni :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Pada program ini indikator yang digunakan adalah persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat, pada tahun 2020 tercatat ada 2 (dua) kasus penyampaian aspirasi oleh masyarakat terkait konflik sosial dimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ikut terlibat dalam proses mediasi :

- Kasus sengketa lahan antara PT. Borneo Indo Tani dengan masyarakat di tiga desa di kecamatan Cintapuri.
- Kasus sengketa lahan antara PTPN Danau Salak dengan masyarakat PTPN Danau Salak dengan masyarakat Desa Sungai Arfat.

Selain melibatkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik proses mediasi ini juga melibatkan unsur pemerintah kecamatan, aparat keamanan dan para tokoh masyarakat. Sehingga secara perhitungan dari target 100 persen jumlah kasus yang ditangani maka capaian kinerjanya juga 100 persen karena dari dua kasus konflik sosial yang dilaporkan keduanya langsung ditangani oleh Pemerintah Daerah termasuk didalamnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan.

Target kinerja pada kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan adalah 2 rapat/pertemuan dan penyusunan 1 dokumen rencana aksi daerah dari tim terpadu penanganan konflik sosial, pada tahun 2020 realisasi kinerja sesuai target yang ditentukan dengan capaian 100%.

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

Target kinerja pada kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan adalah 1 laporan dengan realisasi kinerja sesuai target yang ditentukan dengan capaian 100%. Adapun laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan pemantauan dan Pendataan Kegiatan Orang Asing, Non Government Organization (NGO) dan Lembaga Asing di Wilayah Kabupaten Banjar.

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator dalam program ini adalah Persentase Ormas yang terdaftar dengan target ada 15 persen ormas terdaftar dari seluruh ormas yang ada di Kabupaten Banjar, pada tahun 2020 tercatat ada 180 ormas di Kabupaten Banjar dan dari sejumlah itu 49 ormas tidak memperpanjang izinnya, hanya 131 ormas yang aktif izinnya, sehingga kalau dimasukkan dalam perhitungan 131 ormas itu jumlahnya adalah 72,78 persen dari seluruh ormas yang ada.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat.

Target kinerja pada kegiatan Peningkatan rasa solidaritas dan Ikatan Sosial di Kalangan Masyarakat ini adalah jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar)/ormas yang melapor, pada tahun 2020 ditargetkan ada 16 ormas yang membuat SKT atau melaporkan diri bagi ormas yang terdaftar secara berjenjang, realisasinya ada 18 ormas yang membuat SKT dan melapor sehingga capaian kinerjanya adalah 100 persen

b. Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa

Target kinerja pada kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja 1 kegiatan dengan capaian 100%, berupa pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah Dalam Rangka Menumbuhkembangkan dan Melestarikan Kembali Budaya Banjar, dengan peserta sebanyak 60 orang yang terdiri dari Organisasi Kemasyarakatan dibidang kesenian, guru beserta pelajar.

3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Indikator pada program ini adalah Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan

kebangsaan dengan target 200 peserta, didalam program ini kegiatan Seminar, Talk Show, Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan merupakan satu-satunya kegiatan didalamnya, dengan indikator jumlah orang yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan dengan targetnya 100 orang peserta, namun sampai akhir tahun kegiatan ini tidak sempat terlaksana, sehingga capaian kinerja program dan kegiatannya adalah 0

4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Indikator pada program ini adalah persentase penurunan PEKAT (judi, miras, sajam, narkoba) dengan target 2 persen ditahun 2020. Realisasinya angka kriminal terkait Pekat pada tahun 2020 sebanyak 181 kasus, dan jumlah kasus Pekat tahun sebelumnya ditahun 2019 yakni sebanyak 234 kasus, sehingga ada penurunan kasus sebanyak 53 kasus dibanding tahun sebelumnya, maka kalau dihitung persentase penurunan kasus Pekat pada tahun 2020 adalah sebesar 22,65 persen, dengan kinerja pada program ini sebesar 1.464 persen.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

a. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba

Target kinerja pada kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/penggunaan Minuman Keras dan Narkoba adalah 1 kegiatan dengan realisasi kinerja sebanyak 1 kegiatan yakni Penyuluhan pencegahan peredaran penggunaan minuman keras & narkoba di PKBM Banua Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kota tanggal 14 Februari 2020.

b. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian.

Target kinerja pada kegiatan ini adalah 2 kegiatan dengan realisasi kinerja sebanyak 2 kegiatan dengan capaian 100 persen.

Adapun kegiatan Penyuluhan Pencegahan Praktek Perjudian berlokasi di :

- Desa Tangkas, Kecamatan Martapura Barat
- Desa Sungai Lakum, Kecamatan Kertak Hanyar.

c. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Membawa Senjata Tajam.

Karena alasan pemangkasan anggaran kegiatan ini dihapuskan.

5. Program Kewaspadaan Diri dan Pembinaan Masyarakat

Dalam program ini indikator kinerjanya adalah Kasus terkait isu SARA, ditargetkan ada 0 kasus SARA pada tahun 2020 dengan capaian 0 kasus SARA yang terjadi sehingga perhitungannya adalah 100 persen.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKDM

Semula target kinerja pada kegiatan sosialisasi dan pembentukan FKDM ini adalah 300 peserta sosialisasi, namun dengan alasan pemangkasan anggaran, kegiatan sosialisasi FKDM nya dihapus, sehingga target kinerja pada kegiatan ini adalah 0

b. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FKUB.

Semula target kinerja pada kegiatan sosialisasi dan pembentukan FKUB ini adalah 300 peserta sosialisasi, namun dengan alasan pemangkasan anggaran, kegiatan sosialisasi FKUB nya dihapus, sehingga target kinerja pada kegiatan ini adalah 0

c. Kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FPK

Semula target kinerja pada kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan FPK ini adalah 60 peserta sosialisasi, namun dengan alasan pemangkasan anggaran, kegiatan sosialisasi FPK nya dihapus, sehingga target kinerja pada kegiatan ini adalah 0

untuk tahun 2020 ditetapkan target 254 kasus kriminal terkait perjudian, sajam, miras dan narkoba terjadi di Kabupaten Banjar, dan sampai akhir tahun 2020 di Kabupaten Banjar tercatat ada 181 kasus kriminal yang terjadi, yang artinya didapatkan realisasi sejumlah 181 kasus, dengan persentase sebesar 128,74 persen capaian kinerja.

Adapun anggaran biaya yang ditetapkan menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 771.106.230 dengan realisasi sebesar Rp. 643.597.925 atau sebesar 83,46 persen.

Tindak lanjut yang akan datang

Pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang indikator kinerjanya memiliki capaian kosong karena saat realokasi anggaran pelaksanaan acara sosialisasi/penyuluhan dalam kegiatan dihapus habis padahal indikator kinerja diambil dari jumlah peserta sosialisasi/penyuluhan, kedepannya diharapkan bidang yang menangani kegiatan tidak menghapus habis kegiatannya yang mengandung indikator kinerja dan tentunya bisa menyusun indikator kinerja yang lebih *smart*.

B.2 Sasaran 2

"Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat"

Hasil evaluasi capaian kinerja Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat melalui 1 (satu) indikator kinerja dengan capaian berhasil. Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Tahun 2020

Indikator	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	73 %	77,44 %	106,08 %

Faktor keberhasilan sasaran ini adalah :

- 1) Peranan partai politik dan tim pendukung calon kepala daerah yang menggerakkan kader dan massanya untuk senantiasa berperan serta dalam pemilu.
- 2) Situasi Kamtibmas yang kondusif dimasyarakat walau di tengah pandemi covid-19

Sasaran Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat dengan indikator Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, program yang dilaksanakan yakni Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Indikator pada program ini ada dua yakni persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Legislatif dan Presiden, serta persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Provinsi, untuk tahun 2020 indikator yang dipakai adalah persentase partisipasi masyarakat dalam Pilkada Provinsi, dengan target sebesar 73 persen. pada tahun 2020 tercatat ada sebanyak 306.344 orang masyarakat yang memberikan suaranya dalam Pilkada Provinsi dari 395.589 orang masyarakat yang terdaftar baik statusnya terdaftar dalam Daftar Pemilih

Tetap (DPT), pemilih yang pindah memilih, maupun yang menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik/surat keterangan (DPTb), sehingga dapat dihitung persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu ada sebesar 77,44 persen, adapun target pada tahun 2020 adalah ada sebanyak 73 persen dari masyarakat yang terdaftar mengikuti pemilu, sehingga dapat dihitung capaian kinerja pada sasaran ini adalah sebesar 106,08 persen.

Program ini di dukung kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Kegiatan Penyuluhan Kepada Masyarakat.

Pada awalnya target kinerja pada kegiatan ini adalah penyuluhan kepada masyarakat sebanyak 3 paket kegiatan, namun karena adanya pandemi Covid-19 dimana mengumpul massa/melaksanakan penyuluhan menjadi hal yang mustahil dilaksanakan sehingga target kinerja diganti menjadi 1 kegiatan anjagsana kepada masyarakat, namun karena beberapa alasan kegiatan ini pun tidak bisa dilaksanakan.

b. Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian perselisihan partai politik.

Semula target kinerja pada kegiatan ini adalah 2 kegiatan sosialisasi, namun karena alasan pemangkasan anggaran kegiatan sosialisasinya dihapuskan, sehingga kinerjanya adalah 0

c. Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik.

Target kinerja pada Kegiatan Koordinasi Forum Forum Diskusi Politik adalah 1 kegiatan sosialisasi dengan realisasi kinerja sebanyak 0 kegiatan dengan capaian 0 persen.

d. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Target kinerja pada Kegiatan monev adalah 1 laporan dokumen, untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik, pemerintahan yang kondusif di daerah perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan.

Realisasi kinerja berhasil menyusun 1 laporan dokumen, dengan capaian 100 %. Ada 4 kegiatan selama 1 tahun yaitu setiap triwulan Tim membuat laporan yang intinya memantau kondisi kamtibmas dan politik di wilayah Kabupaten Banjar. Sehubungan dengan tahun 2020 dilaksanakan Pemilihan Kepala Daerah maka tim monev lebih fokus memonitor persiapan dan pasca pelaksanaan Pilkada.

e. Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik

Target kinerja untuk kegiatan Pembinaan Laporan Keuangan Partai Politik adalah 9 laporan dengan realisasi target kinerja 9 laporan dengan capaian 100%. Adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi bantuan keuangan Parpol yang masuk dan telah memenuhi persyaratan kelengkapannya berdasarkan Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Berdasarkan hasil Rapat Tim Verifikasi pada hari Rabu, tanggal 23 September 2020 setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas administrasi teradap 9 (Sembilan) proposal/permohonan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ditahun 2020. Dan hasilnya 9 (Sembilan) Parpol tersebut di atas dinyatakan lolos verifikasi oleh Tim.

f. Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019.

Target kinerja pada Kegiatan Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pileg dan Pilkada tahun 2020 adalah 2 kegiatan, dengan realisasi kinerja 2 kegiatan dengan capaian 100 %.

Adapun realisasi kegiatan ini berupa :

- Pendirian posko pemantauan pilkada tahun 2020 dan pembuatan spanduk Pilkada
- Pembuatan Buku Saku Pilkada 2020.

Untuk tahun 2020 ditetapkan target sasaran sebanyak 73% partisipasi politik masyarakat dalam pemilu Pemilihan Kepala Daerah Provinsi, dengan capaian akhir ada 77,44 persen partisipasi politik masyarakat yang artinya ada realisasi kinerja sebesar 106,08 persen.

Adapun secara anggaran biaya yang ditetapkan menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 438.381.100 dengan realisasi sebesar Rp. 339.867.367 atau sebesar 77,53 persen

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi pelaksanaan anggaran yang dikelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banjar tahun 2020 adalah sebesar Rp 4.243.369.235 (86,98 %) dengan rincian untuk belanja tidak langsung Rp 2.666.734.459 (62,84 % dari total realisasi) dan belanja langsung sebesar Rp 1.576.634.776 (37,16 % dari total realisasi).

Realisasi anggaran belanja langsung untuk progam utama sebesar Rp 983.465.292 (81,31 % dari total anggaran yang dilokasikan untuk program utama sebesar Rp 1.209.487.330) sedangkan realisasi anggaran belanja langsung progam pendukung sebesar Rp 593.169.484 (91,23 % total anggaran yang dilokasikan untuk proram pendukung sebesar Rp 650.175.670), dan realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 2.666.734.459 (88,33 % dari total anggaran dari yang dialokasikan pada anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp 3.018.958.634).

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi
			(Rp)	(Rp)	(%)
1	2	3	7	8	9
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Kasus kriminal	771.106.230	643.597.925	83,46
2	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	438.381.100	339.867.367	77,53
3	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	301.085.540	272.142.760	90,39
4	Terbentuknya Forkopimda dan Timdu	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	285.581.540	266.862.760	93,45
5	Terbentuknya Tim Koordinasi dan pengawasan orang/tenaga kerja/lembaga asing	Jumlah dokumen (laporan)	15.504.000	5.280.000	34,06
6	Menumbuhkan dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat	Persentase Ormas yang terdaftar	113.824.800	101.115.481	88,83
7	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan ormas	Jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar) / ormas yang melapor	94.408.800	84.421.881	89,42
8	Terlaksananya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah	Sosialisasi / penyuluhan	19.416.000	16.693.600	85,98
9	Meningkatnya Kemitraan dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	94.555.840	81.309.960	85,99
10	Terlaksananya kegiatan seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	Jumlah orang yang mengikuti seminar, talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	94.555.840	81.309.960	85,99

11	Meningkatkan Keterlibatan Dalam Usaha Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait miras, narkoba, judi, dan sajam)	135.576.810	98.113.424	72,37
12	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	1)Jumlah peserta keg penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba / P4GN, (2)Seminar pencegahan dan Penanggulangan narkoba (3)Workshop P4GN, (4)Jalan sehat anti narkoba, (5)Lomba pidato tentang bahaya narkoba	108.221.610	73.115.224	67,56
13	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	27.355.200	24.998.200	91,38
14	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan membawa sajam	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan membawa senjata tajam	0	0	0,00
15	Terciptanya Kewaspadaan, Kerukunan dan Pembauran di Masyarakat	Kasus terkait isu SARA	126.063.240	90.916.300	72,12
16	Terlaksananya sosialisasi FKDM	Jumlah peserta sosialisasi FKDM	44.874.000	19.309.200	43,03
17	Terlaksananya sosialisasi FKUB	Jumlah peserta sosialisasi FKUB	58.331.740	53.587.000	91,87
18	Terlaksananya sosialisasi FPK	Jumlah peserta sosialisasi FKP	22.857.500	18.020.100	78,84
19	Meningkatnya Pengetahuan dan Pendidikan Politik Pada Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Legislatif, Presiden dan Kepala Daerah	438.381.100	339.867.367	77,53
20	Terselenggaranya penyuluhan pendidikan politik pada masyarakat	Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan	12.788.600	335.900	2,63
21	Terlaksananya sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian parpol	Jumlah kegiatan sosialisasi peraturan per UU tentang fasilitasi penyelesaian Parpol	50.091.800	41.502.684	82,85
22	Terselenggaranya penyuluhan forum diskusi politik	Jumlah peserta kegiatan penyuluhan forum-forum diskusi politik	60.009.500	40.828.296	68,04
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait perkembangan politik di daerah	Jumlah Laporan (dokumen)	8.141.700	6.440.700	79,11
24	Sosialisasi Permendagri 36 Tahun 2018 dan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Parpol	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	14.942.500	8.829.500	59,09
25	Terlaksananya fasilitasi dukungan penyelenggaraan Pileg dan Pilkada	Jumlah Tim Pemantauan, Pembinaan, Fasilitasi dan Pengadaan Sarana prasarana yang tidak diakomodir oleh APBD Provinsi	292.407.000	241.930.287	82,74
	Peningkatan Pengembangan Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	27.746.175	21.009.900	75,72
	Implementasi dan sinkronisasi perencanaan program dan kegiatan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan ketentuan dan sinkronisasi kegiatan pemerintah daerah	3.725.000	2.469.000	66,28
	Koordinasi penyusunan rancangan anggaran dan belanja SKPD	Jumlah dokumen RKA, DPA, RKA Perubahan dan DPA Perubahan	7.625.000	7.065.200	92,66
	Koordinasi penyusunan laporan kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Kinerja (LPPD,LKjIP dan LKPJ)	8.455.000	6.076.300	71,87

	Monitoring dan Evaluasi	Jumlah dokumen hasil monev	5.701.175	3.495.000	61,30
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD yang tersedia	420.000	389.400	92,71
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang tersedia	1.820.000	1.515.000	83,24
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kelancaran administrasi perkantoran	601.421.140	551.151.229	91,64
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	3.900.000	3.705.000	95,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening jaringan telpon dan internet speedy yang dibayarkan	17.000.000	10.754.006	63,26
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasional yang mendapat fasilitasi service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	79.081.790	69.520.816	87,91
	Penyediaan ATK	Jumlah ATK yang tersedia	16.058.528	16.000.000	99,64
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	12.292.000	10.303.600	83,82
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.000.000	2.980.000	99,33
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan kelengkapan kantor	13.800.000	13.590.000	98,48
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah surat kabar dan majalah yang tersedia dan pembuatan spanduk/banner	4.400.000	2.181.000	49,57
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum dalam 1 tahun	13.005.000	7.280.000	55,98
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	31.877.126	31.877.126	100,00
	Penyediaan pendukung administrasi/teknis perkantoran	Jumlah tenaga pendukung administrasi dan teknis perkantoran	267.756.696	267.215.536	99,80
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	70.250.000	69.110.000	98,38
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah mobil jabatan yang mendapat fasilitasi service, suku cadang, BBM dan pembayaran STNK	36.700.000	30.454.145	82,98
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah dokumen perencanaan renovasi yang disusun	10.000.000	9.900.000	99,00

	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan kantor di SKPD yang terpelihara	14.200.000	1.940.000	13,66
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	8.100.000	4.340.000	53,58
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatnya pemahaman aparatur badan kesbangpol tentang peraturan perundang-undangan	21.008.355	21.008.355	100,00
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/sosialisasi/kursus yang terkirim	21.008.355	21.008.355	100,00
TOTAL BELANJA LANGSUNG UTAMA			1.209.487.330	983.465.292	81,31
BELANJA LANGSUNG PENDUKUNG			650.175.670	593.169.484	91,23
BELANJA TIDAK LANGSUNG			3.018.958.634	2.666.734.459	88,33

C.1. Analisa Efisiensi

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat bahwa mayoritas dari 26 sasaran, menunjukkan pencapaian yang sama atau lebih dari 100%, yaitu sebanyak 16 sasaran, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. Sebagai contoh, untuk sasaran strategis Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat telah mencapai kinerja sebanyak 100 % namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 83,46 % dari total anggaran yang dialokasikan. Capaian serupa juga bisa dilihat dari pencapaian sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat dengan pencapaian kinerja sebanyak 100 %, namun dengan realisasi anggaran hanya sebanyak 77,53 %. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi ataupun sangat tinggi.

Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan lebih jauh, juga sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik, yang salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja ($\geq 100\%$)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	6	9	
1	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Penurunan Kasus kriminal	100	83,46	16,54
2	Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam Pemilu	100	77,53	22,47
3	Terciptanya Ketentraman dan Ketertiban di Masyarakat	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	100	90,39	9,61
4	Terbentuknya Forkopimda dan Timdu	Jumlah laporan kegiatan dengan instansi terkait	100	93,45	6,55
5	Terbentuknya Tim Koordinasi dan pengawasan orang/tenaga kerja/lembaga asing	Jumlah dokumen (laporan)	100	34,06	65,94
6	Menumbuhkan dan Meningkatkan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat	Persentase Ormas yang terdaftar	100	88,83	11,17
7	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan ormas	Jumlah pembuatan SKT (surat keterangan terdaftar) / ormas yang melapor	100	89,42	10,58

8	Terlaksananya pengembangan dan pelestarian seni budaya daerah	Sosialisasi / penyuluhan	100	85,98	14,02
11	Meningkatkan Keterlibatan Dalam Usaha Pemberantasan Penyakit Masyarakat	Persentase penurunan tingkat kriminalitas (terkait miras, narkoba, judi, dan sajam)	100	72,37	27,63
12	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan miras dan narkoba	1)Jumlah peserta keg penyuluhan tentang bahaya miras dan narkoba / P4GN, (2)Seminar pencegahan dan Penanggulangan narkoba (3)Workshop P4GN, (4)Jalan sehat anti narkoba, (5)Lomba pidato tentang bahaya narkoba	100	67,56	32,44
13	Terlaksananya kegiatan penyuluhan pencegahan praktek perjudian	Jumlah peserta sosialisasi tentang penyuluhan pencegahan praktek perjudian	100	91,38	8,62
15	Terciptanya Kewaspadaan, Kerukunan dan Pembauran di Masyarakat	Kasus terkait isu SARA	100	72,12	27,88
19	Meningkatnya Pengetahuan dan Pendidikan Politik Pada Masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu Legislatif, dan Kepala Daerah	100	77,53	22,47
23	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terkait perkembangan politik di daerah	Jumlah Laporan (dokumen)	100	79,11	20,89
24	Sosialisasi Permendagri 36 Tahun 2018 dan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Parpol	Jumlah laporan keuangan yang diverifikasi	100	59,09	40,91
25	Terlaksananya fasilitasi dukungan penyelenggaraan Pileg dan Pilkada	Jumlah Tim Pemantauan, Pembinaan, Fasilitasi dan Pengadaan Sarana prasarana yang tidak diakomodir oleh APBD Provinsi	100	82,74	17,26

D. TINDAK LANJUT ATAS EVALUASI LAPORAN KINERJA TAHUN 2019

D.1. Evaluasi kinerja Tahun 2019

Hasil optimalisasi evaluasi dari Inspektorat Kabupaten Banjar terhadap Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar Tahun 2019 memperoleh nilai 71,63 dengan interpretasi predikat BB maka pada tahun 2020 direkomendasikan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar hal-hal sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan indikator dan target kinerja tujuan yang memenuhi kriteria indikator dan target.
2. Menjadikan dokumen Renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran.
3. Mencantumkan asal sumber data informasi kinerja
4. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, informasi kinerja hingga pelaporan.

5. Hasil pengukuran kinerja untuk dapat dijadikan dasar sistem *reward* dan *punishment*.

D.2. Tindak lanjut

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian indikator dan target kinerja sesuai kriteria dan berusaha serealistis mungkin
2. Berusaha menjadikan dokumen Renja sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen anggaran.
3. Mencantumkan asal sumber data informasi kinerja pada laporan kinerja
4. Pada aplikasi SIPD yang diluncurkan Kemendagri untuk menjadi acuan dan standar baru dalam penatausahaan perencanaan dan keuangan pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/kota seluruh Indonesia, nantinya perencanaan, penganggaran, dan pelaporan akan terintegrasi secara penuh.
5. Terkait pemberian *reward* dan *punishment* atas kinerja bidang/subbid atau kinerja individu di Badan Kesbangpol, masih dicari formulasi yang tepat karena dari Pemerintah Kabupaten Banjar sendiri tidak ada memberikan arahan atau panduan terkait hal ini.

a. Kesimpulan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-1 (satu) dan Misi ke-5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar sesuai kewenangan yang dimilikinya.

Pada misi ke 1 (satu), yakni “Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Dan Suasana Kehidupan Beragama” *Badan Kesatuan Bangsa dan Politik* Kabupaten Banjar menetapkan tujuan yang ingin dicapai yakni Meningkatnya Nuansa Kehidupan Beragama Masyarakat Dalam Kehidupan Sehari-hari dengan sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, dengan 5 (lima) program yang dilaksanakan yakni :

1. Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
4. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
5. Program Kewaspadaan Diri Dan Pembinaan Masyarakat.

Untuk pencapaian pada Misi 1 (satu) dengan sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Banjar menetapkan Indikator Sasaran yaitu Penurunan Kasus Kriminal, untuk tahun 2020 ditetapkan target 254 kasus kriminal terkait Perjudian, sajam, miras dan narkoba terjadi di Kabupaten banjar, dan sampai akhir tahun 2020 dikabupaten Banjar tercatat ada 181 kasus kriminal yang terjadi, yang artinya didapatkan realisasi sejumlah 181 kasus, dengan persentase sebesar 128,74 persen capaian kinerja.

Adapun anggaran biaya yang ditetapkan menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 771.106.230 dengan realisasi sebesar Rp. 643.597.925 atau sebesar 83,46 persen.

Adapun pada misi ke 5 (kelima) untuk “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah”, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banjar mempunyai tujuan yakni Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan sasaran Meningkatnya Partisipasi Politik Masyarakat, dengan program yang dilaksanakan yakni Program Pendidikan Politik Masyarakat.

Untuk tahun 2020 ditetapkan target sasaran sebanyak 73 % Partisipasi Politik Masyarakat dalam pemilu, dengan capaian akhir ada 77,44 % Partisipasi Politik Masyarakat yang artinya ada realisasi kinerja sebesar 106,08 persen.

Adapun secara anggaran biaya yang ditetapkan menunjang sasaran ini adalah sebesar Rp. 438.381.100 dengan realisasi sebesar Rp. 339.867.367 atau sebesar 77,53 persen

b. Saran-saran

Laporan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta berbagai kebijakan yang diperlukan.

Lampiran

.....
.....
.....